

BAB IV

**DAMPAK PENGGUNAAN DIPLOMASI DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK INDONESIA–BELANDA**

A. Peran Dunia Internasional dalam Diplomasi

Perundingan yang dilakukan pemimpin Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian, mempertahankan kemerdekaan serta mengusir kekuasaan penjajah. Periode Agustus 1945 sampai dengan Desember 1949 merupakan periode perjuangan panjang yang pahit yang dialami pemerintah Republik Indonesia. Periode tersebut merupakan periode pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk menangkal kembalinya kekuasaan kolonial. Periode untuk mencari dukungan dunia Internasional. Dapat dikatakan bahwa pada periode tersebut merupakan perjuangan untuk menghentikan konflik bersenjata beralih ke perjuangan diplomasi lewat meja perundingan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Perjuangan diplomasi bagi Indonesia merupakan suatu politik untuk mencari dukungan dan pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia. Perjuangan diplomasi yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia banyak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Ternyata perjuangan diplomasi tersebut tidak sia-sia. Diplomasi yang dilakukan dapat mewujudkan harapan rakyat Indonesia. Banyak negara di

dunia yang kemudian memberikan dukungan dan pengakuan atas Kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah satu wujud pengakuan dunia internasional ialah dengan ditanda tangannya perjanjian Linggarjati. Indonesia mendapat pengakuan *de facto* yang diberikan oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Cina. Begitu juga halnya ketika Belanda melakukan agresi militernya yang kedua untuk menaklukkan Indonesia, Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik kepada pihak Indonesia. Amerika kemudian menghentikan pemberian dana bantuan kepada Belanda pada tanggal 22 Desember 1949. Bahkan Kongres Amerika mendesak agar menghentikan semua bantuan ekonomi kepada Belanda. Tekanan Amerika terhadap Belanda dianggap pemimpin Republik Indonesia belumlah cukup. Para pemimpin Republik Indonesia mengharapkan tekanan Amerika yang lebih tegas lagi kepada Belanda. Dukungan Amerika terhadap Indonesia bukan hanya karena agresi militer Belanda saja.¹ Adanya pemberontakan PKI di Madiun menyebabkan Amerika mendukung perjuangan Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan sikap Amerika yang membantu Hatta dan pemerintahnya menumpas pemberontakan komunis di Madiun.

Sejak terjadinya peristiwa PKI, Amerika Serikat yang selalu mendukung Belanda dalam perundingan kini berbalik arah berpihak kepada Indonesia. Pada awalnya Belanda mengira Amerika akan membantu pemerintah Belanda dalam menyelesaikan konfliknya dengan

¹ Dr.A.H.Nasution,*Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode KMB*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung,Indonesia,hlm.135

Indonesia. Hal itu ternyata jauh dari dugaannya, Amerika membantu pemerintah Indonesia dalam menumpas pemberontakan PKI. Bahkan Amerika mengancam, seandainya pemerintah Belanda bersikeras pada pendirian menginginkan kekuasaannya kembali di Indonesia selama masa peralihan, Pemerintah Amerika Serikat akan mengambil langkah yang merugikan Belanda. Amerika juga akan mengundurkan diri dari Komisi Jasa-Jasa Baik dengan segala akibat politiknya kepada Belanda. Amerika Serikat tidak akan ragu-ragu mengambil semua langkah politik yang tepat bagi Indonesia. Mulai saat itu politik Amerika secara jelas mulai menempuh arah yang lebih menguntungkan Republik Indonesia.²

PBB dan Amerika Serikat serta militer Republik Indonesia mulai bersikap tegas kepada Belanda. Hal ini dilakukan dengan memberikan tekanan dan memaksa Belanda untuk menghentikan upayanya membentuk imperium di Indonesia. Belanda dituntut menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia. Amerika mencela habis-habisan kepada Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Amerika mengancam akan menghentikan bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan utama perekonomian di negeri Belanda.

Bukan hanya Amerika, tetapi negara-negara di segala penjuru dunia seperti China, Kolombia, Suria, dan Ukraina juga memberikan tekanan terhadap Belanda. Mendesak agar Belanda segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukannya dari Indonesia. Upaya dan

²K.M.L.Tobing.*Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville.Gunung Agung:Jakarta.hlm.128.*

tindakan militer Belanda terhadap Indonesia dijadikan persoalan dunia yang dicantumkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Sengketa Indonesia-Belanda tidak lagi murni persengketaan dua negara, tetapi sudah merupakan persoalan Internasional yang harus diselesaikan dalam perundingan Dewan Keamanan PBB. Persoalan tersebut berada dalam pengawasan Komisi Jasa-Jasa Baik PBB. Hal tersebut membuat gerah Belanda. pada akhirnya mengusik kedudukan Belanda di Indonesia.

PBB menyarankan agar Belanda dan Indonesia menyerahkan perundingan di bawah pengawasannya. J.U.Van Roijen yang pada tanggal 12 April 1946, pemimpin delegasi negeri Belanda menyetujui saran tersebut. Sementara itu, Dean Acheson, juga menyarankan pada Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Stikker, yang ketika itu berkunjung ke Washington pada tanggal 31 Maret 1946, agar segera menyelesaikan pertikaian Belanda-Indonesia dengan cara damai. Setelah penandatanganan persetujuan Linggarjati, diplomasi yang dijalankan Indonesia akhirnya dapat dicapai. Persetujuan Linggarjati memiliki nilai positif bagi Indonesia.³

Hasil nyata yang dapat dicapai Linggarjati sesudah penandatanganan adalah pengakuan kedaulatan yang mengalir terhadap Republik Indonesia, meskipun pengakuan-pengakuan itu sebagian besar baru berupa pengakuan de facto. Setelah penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1946, Inggris pada tanggal 31 Maret 1946, Amerika Serikat pada

³Dr.A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Periode Linggarjati*, Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung, Indonesia,hlm.35

tanggal 23 April 1946, Afghanistan tanggal 23 September 1947 (*De Jure*), Burma 23 November 1947 dan Uni Soviet 5 Mei 1948 memberikan pengakuan terhadap Republik Indonesia. Pengakuan de facto negara-negara Arab juga terus mengalir. Libanon tanggal 29 Juni 1947, Syiria tanggal 2 Juli 1947, Saudi Arabia tanggal 24 September 1947 dan Yaman tanggal 5 Mei 1948, sedangkan Mesir memberikan pengakuan de jure tanggal 11 Juni 1947.⁴

Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional terwujud setelah penandatanganan persetujuan Linggarjati. Tindakan Belanda yang menginginkan Republik Indonesia hancur ternyata mendapat reaksi dan tekanan dari pihak ketiga. Pemerintah Belanda tidak dapat mengabaikan tekanan-tekanan dari pihak Amerika dan Inggris. Jika Belanda mengabaikan akan berpengaruh kepada kedudukannya dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Karena tekanan dunia internasional tersebut pemerintah Belanda bersedia mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan pihak Republik Indonesia di bawah pengawasan UNCI. Oleh sebagian besar sejarawan Indonesia hal tersebut dianggap sebagai pernyataan “gerak mundur secara terhormat”. Seperti kita ketahui bahwa Belanda tidak pernah mengaku kalah di Indonesia.

Belanda menganggap dipaksa “pergi” dari Indonesia karena tekanan Amerika dan Inggris. Bukan karena tekanan Republik Indonesia. Pemerintah Belanda tetap menghendaki suatu kedudukan khusus di

⁴ M.Sabir. (1987).*Politik Bebas Aktif Tantangan dan Kesempatan* Jakarta : Haji Mas Agung.hlm.7.

Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Belanda meminta Amerika dan Inggris mendukungnya. Oleh karena itu, sekalipun pemerintah Republik Indonesia sudah menyetujui kembali ke Yogyakarta, tetapi Belanda tetap merecokinya. Belanda berupaya agar Republik Indonesia terisolasi dengan daerah lainnya di Indonesia. Republik Indonesia hanya berada di daerah Yogyakarta. Sebatas daerah kesultanan Yogyakarta saja, tanpa bobot nasional.⁵

Banyak negara di dunia mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh pengakuan dunia internasional. Secara menyeluruh hasil-hasil diplomasi yang dilakukan pemimpin Republik Indonesia memberi rasa percaya diri dan rasa optimisme bagi delegasi Republik Indonesia yang akan bersidang di Dewan Keamanan PBB. Dunia internasional bersedia mendengar dan memberi perhatian kepada Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sidang Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi. Resolusi Dewan Keamanan PBB inilah yang telah mengubah seluruh sifat sengketa Indonesia-Belanda.

B. Dampak Perundingan Republik Indonesia

Politik luar negeri yang dijalankan Indonesia pada periode 1946 sampai 1949 difokuskan pada penyelesaian sengketa dengan Belanda. Sejak Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Republik Indonesia mendambakan pengakuan dari dunia Internasional terhadap negaranya yang

⁵ K.M.L Tobing. *op.cit.* hlm. 82

baru lahir. Pada kenyataannya cita-cita tersebut baru dapat diwujudkan dalam perundingan akhir Indonesia-Belanda, yaitu pada Konverensi Meja Bundar (KMB). Hasil yang dicapai KMB sudah jelas membuktikan dapat membawa manfaat yang nyata, menjiwai hubungan bangsa-bangsa yang terlibat dalam kerjasama Uni Belanda-Indonesia

Persetujuan yang dicapai pada KMB telah memberikan kepastian pada bangsa Indonesia. Selambat lambatnya tanggal 30 Desember 1949 kedaulatan yang penuh akan diserahkan kerajaan Belanda kepada bangsa Indonesia. Pihak pemerintah Belanda dan pemerintah RIS sudah menyetujui rencana-rencana persetujuan KMB secara utuh. Delegasi Hatta oleh presiden RIS telah diberi wewenang untuk menerima penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda. Dalam hal ini, Drs. Willem Drees berpendapat bahwa penyerahan kedaulatan yang nyata tidak dapat dicabut kembali, tetapi dilangsungkan sesegera mungkin.

Menurut Drs. Willem Drees, RIS adalah sebuah negara yang demokratis dengan dasar federal. RIS mempunyai hak untuk menentukan sendiri nasib terhadap rakyatnya. RIS akan menjalin kerjasama Indonesia-Belanda dalam suatu ikatan UNI dalam persamaa derajat dan martabat. Belanda berpendapat tidak perlu ada suatu masa peralihan. Setelah KMB, kedaulatan Indonesia tak dapat dicabut. Kedaulatan tanpa syarat dapat diserahkan kepada RIS. Menjelang pertengahan bulan Desember persetujuan-persetujuan KMB telah disahkan. Penyerahan kedaulatan Indonesia yang resmi akan dilangsungkan di Istana Den Haag di

Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah RIS dan wakil-wakil negara asing di Den Haag dan Baginda Ratu akan menandatangani piagam penyerahan kedaulatan serta pengakuan kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan yang sebenarnya akan dilangsungkan di Istana (kini Istana Merdeka) dilapangan Gambir Jakarta Utara dan Koningsplein (kini Merdeka Utara). Piagam akan diserahkan oleh wakil tinggi Mahkota Kerajaan Belanda kepada suatu delegasi pemerintah RIS. Bendera Belanda akan diturunkan. Sebagai gantinya bendera nasional Indonesia, Sang Merah Putih akan dikibarkan di atas atap Istana. Hal itu sebagai suatu pengakuan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan permulaan berlakunya tertib hukum baru.⁶

Keberhasilan pemimpin Republik Indonesia dalam perjuangan diplomasinya telah mencapai sasaran. Sasaran pokok ialah adanya pengakuan dunia internasional atas Kemerdekaan Indonesia. Politik luar negeri yang dijalankan pada waktu itu hanya difokuskan pada penyelesaian sengketa dengan Belanda. Sejak kemerdekaan diproklamasikan yang dicita-citakan Republik Indonesia hanyalah pengakuan dari dunia Internasional terhadap negaranya yang baru lahir. Negara pertama yang mengakui RI secara de jure adalah negara Mesir. Selain Mesir, dunia Internasional memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Republik Indonesia melalui proses yang panjang.

⁶ *Ibid.* hlm. 323

Perundingan konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 telah memberikan kemenangan bagi Indonesia berupa penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Negara di seluruh dunia seolah-olah berlomba-lomba mengakui Kemerdekaan Indonesia. Mulai saat itu politik luar Negeri Indonesia perlu diformulasikan lebih baik. Lebih-lebih setelah Indonesia diterima sebagai anggota dari PBB.⁷ Negara Internasional yang memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia kemudian adalah Rusia dan RRC. Indonesia akhirnya dimasukkan ke dalam PBB sebagai anggota ke-60 dari badan Internasional dunia itu pada tahun 1950. Jika perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan cara diplomasi, negara Indonesia tidak dapat dipertahankan. Kepiawaian pemimpin bangsa Indonesia dalam berdiplomasi tidak lepas dari campur tangan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat. PBB mempunyai arti penting bagi Indonesia karena dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. PBB merupakan forum yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia untuk mengusir penjajahan PBB berusaha melenyapkan ketidakadilan di dunia. PBB berusaha menciptakan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah PBB melibatkan diri dalam persoalan Indonesia Belanda, persengketaan tersebut tidak menjalar menjadi perang dunia. PBB mempunyai pengaruh moral dan politik dari anggotanya secara kolektif.

⁷Ide Anak Agung Gde Agung(1995). *Pernyataan Rum-Van Roije (Rum-Roijen Statement 7 Mei 1994)* Yogyakarta:Yayasan Pustaka Nusataramadan UI-Press . hlm. 85

Mekanisme musyawarah yang telah dikembangkan PBB telah membuktikan keampuhannya dalam membatasi dan mengurangi krisis dalam situasi-situasi yang gawat.⁸ PBB sangat berperan dalam menentukan perkembangan pembangunan sosial dan ekonomi internasional yang luas dan kompleks, berperan dalam semua aspek seperti: mengusahakan taraf hidup yang lebih tinggi.

Keterlibatan pihak ketiga terutama PBB dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda membawa dampak positif bagi Indonesia. Perundingan diplomasi yang dijalankan telah menghasilkan kemenangan bagi Indonesia. Sebagai hasilnya, kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan. Kedaulatan bangsa Indonesia diakui dunia Internasional setelah melalui berbagai macam perundingan. Hingga sampailah yang telah dicita-citakan kemerdekaan diperkuat dengan pengakuan dunia Internasiol sehingga memperkuat nilai tawar Indonesia dalam berbagai masalah internasional yang mungkin akan dihadapi di kemudian hari. Setelah situasi politik stabil dan mendapat pengakuan dunia Internasional maka perlu diadakan perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan dimaksudkan untuk meletakkan dasar kerjasama antara Republik Indonesia dengan Pemerintahan Belanda dikemudian hari. Kerajaan Belanda dan Indonesia.

⁸ *Ibid.* hlm. 97